

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan wujud nyata dalam usaha untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan diselenggarakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan. Salah satu program pembangunan Nasional yang menjadi skala prioritas adalah Program penanggulangan kemiskinan, program tersebut merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi di Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah pokok yang dialami oleh sebagian besar Negara di Dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, kemiskinan juga dialami oleh Negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatasi kemiskinan sudah banyak di dukung dengan aturan misalnya dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan, bahwa dibentuknya Negara Indonesia dan di bentuknya pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” Artinya dalam pemahaman tersebut kemiskinan adalah tanggung jawab dari Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Negara Republik Indonesia, adapun kutipan pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai berikut dibawah ini :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dalam Undang-undang ini penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Kesejahteraan biasanya tidak lepas dari kemiskinan, untuk itu pemerintah menerapkan program keluarga harapan (PKH), sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis sebagai bentuk penanggulangan sosial, program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak Tahun 2007 pemerintah telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Bantuan dana PKH yang di berikan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua RTSM bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil dan/atau terdapat anak berusia 0-15 Tahun yang dapat mengaksesnya. Manfaat

PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin (KSM), dana bantuan PKH ini mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus tujuan PKH berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan taraf peserta PKH
3. Meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil (Bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (Balita) dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin (KSM).

Setelah diatas di uraikan secara singkat dasar dan tujuan di gulirnya PKH program tersebut selintas sangatlah ideal menjadi salah satu jalan solusi mengatasi rantai kemiskinan yang sudah akut pada bangsa Indonesia.

Berdasarkan data dari UPPKH tingkat Kabupaten jumlah peserta PKH berjumlah 40 Kecamatan dan salah satunya Kecamatan Kapetakan, peneliti justru memilih Kecamatan Kapetakan sebagai objek untuk diteliti dikarenakan masalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan yang belum optimal, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan sudah berjalan dari Tahun 2015 hingga saat ini. Adapun jumlah sebagai penerima PKH di Kecamatan Kapetakan sebanyak 9 desa yang jumlahnya 3.476 peserta PKH, dari 9 desa tersebut penulis memilih desa Dukuh untuk diteliti.

Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan Pasal 3. bahwa sasaran PKH yaitu: keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Keluarga Penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban (KPM PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. Namun program keluarga harapan (PKH) di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah, atau tidak sesuai yang di harapkan.

Hal ini terbukti adanya permasalahan yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, yaitu diantaranya sosialisasi program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat kurang optimal seharusnya uang PKH dari komponen pendidikan dan kesehatan digunakan untuk keperluan

pendidikan dan kesehatan anak tetapi uang PKH digunakan untuk renovasi rumah, dari pelaksanaannya bantuan PKH juga tidak tepat sasaran diantaranya keluarga yang miskin tidak dapat uang PKH tetapi yang kaya dapat uang PKH.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang di tuangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan suatu masalah pokok didalam penelitian ini yaitu “ **Belum Optimal Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.**

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis mengangkat beberapa masalah yang nantinya akan menjadi objek penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ?

- 2 Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ?
- 3 Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan di kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sosial, terutama Ilmu Administrasi Negara, khususnya di bidang implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH)

- b. Untuk pembelajaran bagi peneliti dalam menganalisis masalah secara Ilmiah

1.5.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pendamping PKH di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

- PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfe (CCT)* yang juga dikenal di Dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis sebagai bentuk penanggulangan sosial, program ini memberikan bantuan dana kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak Tahun 2007 pemerintah telah mengklaim melaksanakan program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan program keluarga harapan (PKH)
- Pasal 3 menyebutkan bahwa sasaran PKH yaitu : keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- Tujuan program keluarga harapan secara khusus yaitu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, untuk meningkatkan taraf pendidikan taraf peserta PKH, dan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil (Bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (Balita) dan anak pra sekolah anggota keluarga sangat miskin (KSM).

Implementasi Kebijakan

Dwiyanto Indiahono (2009:143) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah di tentukan dalam

kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan, tahap ini menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah di rencanakan.

Sedangkan Menurut Grindle 1980 (Agustino, 2016:142) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di raih)

Sementara itu Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Agustino, 2016:146) juga memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan dengan mengatakan implementasi kebijakan kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Menurut Briant W. Hoogwood dan Lewis A. Gun 1978 (Riant Nugroho D. 2004:170) adalah :

Implementasi Kebijakan diperlukan beberapa syarat, Pertama berkenaan dengan Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, kedua apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumberdaya waktu, ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, ke empat apakah kebijakan yang akan di implementasikan didasari hubungan kausal yang handal, kelima seberapa banyak kausalitas yang terjadi

Selanjutnya menurut George C. Edwards III (Agustino, 2016:136) mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan dampak langsung dan tidak langsung, dari Implementasi terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edwards adalah :

1. Komunikasi (*Communication*)

Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau di komunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. (komunikasi atau transmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan kedalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat (atau digunakan) dalam pengukuran keberhasilan variabel komunikasi tersebut menurut Edwards III yaitu :

a. Transmisi

Merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah satu pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureauacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat di raih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan di jalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edaward dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam Implementasi kebijakan Informasi mempunyai dua bentuk yaitu :

1. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan
2. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang (*Authority*)

Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi jika, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu di cermati pada variabel disposisi menurut Edward adalah :

a. Efek Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga

b. Pengaturan Birokrasi

Merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja hingga metode *bypassing* personil.

c. Insentif

Menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik menurut Edwards adalah :

a. Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih Fleksibel

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur , administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada

setiap harinya (*days-to-days potics*) sesuai dengan standar yang telah diterapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga)

b. Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Kebijakan Publik

Menurut Dye 1992 (Agustino, 2006:15) kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, ataupun lainnya)

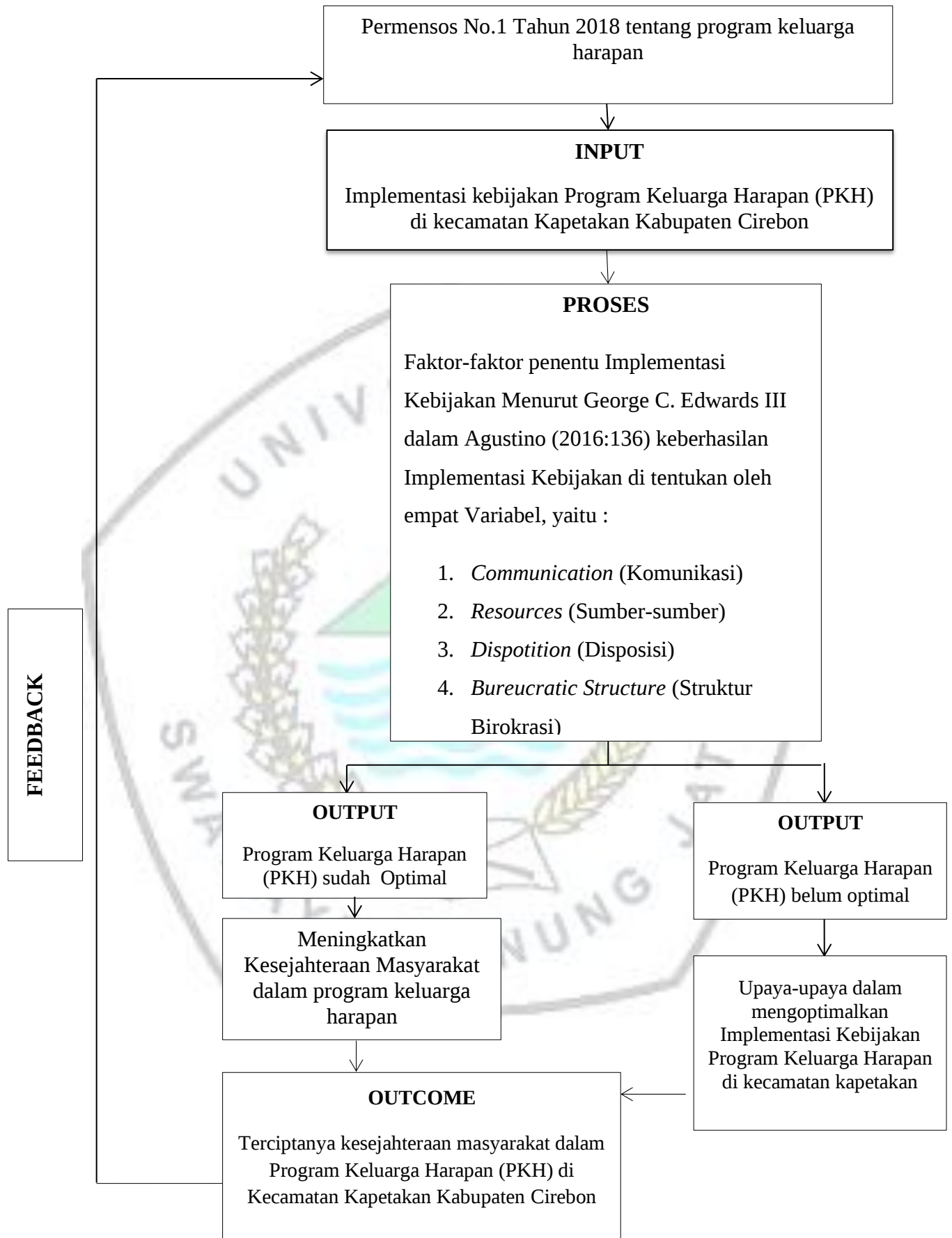
Menurut Mazmanian dan Sabatier 1983 (Agustino, 2016:128) Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk Undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan.

Sedangkan menurut James E. Anderson 1979 (Dwiyanto Indiahono, 2009:17) Kebijakan sebagai prilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Menurut Friedrich 1969 (Agustino, 2016:16) Mengatakan bahwa Kebijakan Publik sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat di suatu Negara oleh para aktor yang membuat kebijakan yang ada di lingkungan tersebut. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.





1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Kebijakan Publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan.

Sedangkan implementasi kebijakan merupakan dampak langsung dan tidak langsung, dari implementasi terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Program keluarga harapan Permensos No.1 Tahun 2018 PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfe (CCT)* yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis sebagai bentuk penanggulangan sosial, program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak Tahun 2007 pemerintah telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Edwards III dalam Leo Agustino, 2016:136)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen 1982 (Moleong, 2017:3) ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, Interaksionis simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, *the Chicago School*, fenomenologi, studi kasus, interpretative, ekologis dan deskriptif.

Pendapat lain mengemukakan Bogdan dan Taylor 1975 (Moleong, 2017:4) Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Denzim dan Lincoln 1987 (Moleong, 2017:5) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini dalam penelitian kualitatif metode yang biasa di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar belakang (Moleong 2013:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon memerlukan Informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah peneliti guna memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat.

Informan-informan dalam penelitian ini yaitu :

A. Informan Kunci

Informan kunci adalah informasi yang menguasai tentang permasalahan implementasi kebijakan program keluarga harapan yaitu : Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan yang terdiri atas fasilitator/pendamping masyarakat penerima PKH dan koordinator PKH.

B. Informan Pendukung

Masyarakat di luar informan Kunci yang dapat memberikan informasi lengkap atau tambahan yaitu masyarakat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam penelitian, dengan adanya teknik pengumpulan data maka penulis dapat menentukan cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan jenis penelitian yang di gunakan. Tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ada dua data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data Primer akan di ambil dari data survei yang dilakukan berupa hasil wawancara peneliti dengan informan, sedangkan data skunder diambil dari studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2016:137-145) :

1. Observasi

Observasi merupakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain,yaitu wawancara dan kuesioner slalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

2. Wawancara

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang enggan berlalu. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari karya-karya seseorang.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Moleong 1994 (Muhammad Idrus, 2009:145) Keabsahan data merupakan pembuktian validitas data di tentukan oleh kredibilitas temuan dan interprestasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan dengan sesuai kondisi yang senyatanya dan di setujui oleh subjek penelitian.

- a. Teknik Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Menurut Denzim 1978 (Muhammad Idrus, 2009:145)Triangulasi yang dimaksud meliputi : menggunakan Sumber lebih dari satu/ganda
- b. Menggunakan metode lebih dari satu/ganda
- c. Menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda
- d. Menggunakan teori yang berbeda-beda. Secara sederhana untuk mengurainya, dalam penelitian kualitatif dapat dikenal dengan istilah jenuh. Data jenuh artinya kapan dan dimanapun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek) ,hasil jawaban tetap konsisten sama.

pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan data.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan Analisis terhadap jawaban yang sudah di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel.

Miles and Huberman 1984 (Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa : aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation.

Ada tiga cara yang di gunakan oleh Miles dan Huberman dalam teknik analisis data kualitatif diantaranya (Sugiyono, 2016:247-252) :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan Konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9 Lokasi Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan alasan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan uang PKH tidak digunakan sebagaimana mestinya dimana masih perlu penanganan masalah implementasi kebijakan program keluarga harapan
2. Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon karena dekat dan mudah di jangkau
3. Adanya data yang mendukung penelitian baik berupa dokumen ataupun wawancara dan pengamatan

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 8 bulan, dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan September 2020. Dengan uraian jadwal penelitian sebagai berikut :



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]